



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan arsip serta untuk meningkatkan penataan arsip secara tepat, cepat, dan sistematis diperlukan pola klasifikasi arsip di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan kesekretariatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia selaku lembaga kearsipan nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap dasar hukum klasifikasi arsip dan pola klasifikasi arsip dalam fungsi pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa;
- c. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan klasifikasi arsip sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Klasifikasi Arsip;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG KLASIFIKASI ARSIP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan fisik dan informasi Arsip di Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengelompokkan Arsip secara sistematis, terstruktur, dan efektif berdasarkan subjek dan perihal atau masalah, yang diidentifikasi dalam bentuk kode berupa gabungan huruf dan angka.
3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
5. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip dikelompokkan berdasarkan permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang terdiri atas:
 - a. fungsi substantif; dan
 - b. fungsi fasilitatif.
- (2) Klasifikasi Arsip fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan tugas pokok.

- (3) Klasifikasi Arsip fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan tugas penunjang.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip Bawaslu disusun dengan menggunakan kode Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (2) Kode Arsip sebagaimana ayat (1) menjadi tanda pengenal masalah sesuai tugas dan fungsi unit kerja serta berfungsi sebagai dasar dalam pemberkasan dan penataan Arsip.

Pasal 4

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:

- a. pokok masalah;
- b. sub masalah; dan
- c. sub-sub masalah.

Pasal 5

- (1) Pokok masalah diberi kode huruf yang mengandung arti singkatan atau kependekan penyebutan pokok masalah yang ditempatkan pada bagian pertama susunan kode.
- (2) Sub masalah diberi kode angka secara berurutan diawali dengan 2 (dua) angka di depannya sesuai dengan pokok masalah yang ditempatkan pada bagian kedua susunan kode.
- (3) Sub-sub masalah diberi kode angka secara berurutan diawali dengan 2 (dua) angka di depannya sesuai dengan pokok masalah yang ditempatkan pada bagian ketiga susunan kode.

Pasal 6

- (1) Pokok masalah pada klasifikasi Arsip fungsi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengawasan Pemilu Pengawasan Pemilu dengan menggunakan kode PM;

- b. Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan menggunakan kode PP; dan
 - c. Penyelesaian Sengketa dengan menggunakan kode PS.
- (2) Pokok masalah pada klasifikasi Arsip fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perencanaan dengan menggunakan kode PR;
 - b. Organisasi dan Tata Laksana dengan menggunakan kode OT;
 - c. Persuratan dan Kearsipan dengan menggunakan kode KA;
 - d. Keuangan dengan menggunakan kode KU;
 - e. Perlengkapan dengan menggunakan kode PL;
 - f. Hukum dengan menggunakan menggunakan kode HK;
 - g. Hubungan Masyarakat dengan menggunakan kode HM;
 - h. Kepegawaian dengan menggunakan kode KP;
 - i. Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan dengan menggunakan kode RT;
 - j. Pengawasan dengan menggunakan kode PW; dan
 - k. Teknologi Informasi dengan menggunakan kode TI.

Pasal 7

Klasifikasi Arsip Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1427), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1251

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP

KLASIFIKASI ARSIP

1. FUNGSI SUBSTANTIF

PM PENGAWASAN PEMILU

00 Teknis Pengawasan Pemilu

00.00 Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknis pengawasan penyelenggaraan Pemilu tingkat pusat; meliputi Indeks Kerawanan Pemilu, pelaksanaan teknis pengawasan Pemilu, kalender pengawasan, dan jurnal pengawasan Pemilu.

00.01 Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknis pengawasan Pemilu tingkat provinsi; meliputi Indeks Kerawanan Pemilu, pelaksanaan teknis pengawasan Pemilu, kalender pengawasan Pemilu, dan jurnal pengawasan Pemilu.

00.02 Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknis pengawasan Pemilu tingkat kabupaten/kota; meliputi Indeks Kerawanan Pemilu, pelaksanaan teknis pengawasan Pemilu, kalender pengawasan, dan jurnal pengawasan Pemilu.

01 Hasil Pengawasan Pemilu

01.00 Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pengawasan Pemilu Tingkat Pusat

01.01 Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi

01.02 Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota

02 Rekomendasi Hasil Pengawasan Pemilu

02.00 Rekomendasi Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat

Naskah-naskah berkaitan dengan rekomendasi atau saran perbaikan hasil pengawasan Pemilu tingkat pusat

02.01 Rekomendasi Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi

Naskah-naskah berkaitan dengan rekomendasi atau saran perbaikan hasil pengawasan Pemilu tingkat provinsi

02.02 Rekomendasi Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota

Naskah-naskah berkaitan dengan rekomendasi atau saran perbaikan hasil pengawasan Pemilu tingkat kabupaten/kota

03 Sosialisasi Pengawasan Pemilu

03.00 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi dalam rangka Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat.

03.01 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi dalam rangka Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi.

03.02 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi dalam rangka Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota.

04 Kerjasama Pengawasan Pemilu
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama pengawasan Pemilu Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

05 Partisipasi Masyarakat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan Pemilu.

06 Analisis Teknis Pengawasan Pemilu dan Potensi Pelanggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses analisis hasil pengawasan Pemilu dan potensi pelanggaran; mulai dari laporan hasil pengawasan yang berpotensi pelanggaran hingga rekomendasi pelanggaran atau bukan pelanggaran.

PP PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PEMILU

00 Penanganan Temuan Pelanggaran

00.00 Penanganan temuan pelanggaran Tingkat Pusat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Temuan lapangan Pelanggaran Pemilu Tingkat Pusat antara lain; formulir temuan, bukti penerimaan, laporan temuan, klarifikasi/verifikasi, berita acara, rekomendasi/resume pelanggaran.

- 00.01 Penanganan temuan pelanggaran Tingkat Provinsi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan temuan lapangan pelanggaran Pemilu Tingkat Provinsi antara lain; formulir temuan, bukti penerimaan, laporan temuan, klarifikasi/verifikasi, berita acara, rekomendasi/resume pelanggaran.

- 00.02 Penanganan temuan Tingkat Kabupaten/Kota
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan temuan lapangan pelanggaran Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota antara lain; formulir temuan, bukti penerimaan, laporan temuan, klarifikasi/verifikasi, berita acara, rekomendasi/resume pelanggaran.

- 01 Penanganan Laporan/pengaduan Pelanggaran Pemilu
 - 01.00 Penanganan laporan/pengaduan pelanggaran Pemilu Tingkat Pusat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Laporan/pengaduan Pelanggaran Pemilu Tingkat Pusat; meliputi registrasi pengaduan, penelitian administrasi, berkas pengaduan, proses penelitian/verifikasi materiil dan resume pengaduan.

 - 01.01 Penanganan laporan/pengaduan pelanggaran Tingkat Provinsi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Laporan/pengaduan Pelanggaran Pemilu Tingkat Provinsi; meliputi registrasi pengaduan, penelitian administrasi, berkas pengaduan, proses proses penelitian/verifikasi materiil dan resume pengaduan.

 - 01.02 Penanganan laporan/pengaduan pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan laporan/pengaduan pelanggaran

Pemilu tingkat Kabupaten/Kota; meliputi registrasi pengaduan, penelitian administrasi, berkas pengaduan, proses penelitian/verifikasi materiil dan resume pengaduan.

02 Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Tidak Diregistrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang tidak memenuhi syarat.

PS PENYELESAIAN SENGKETA

00 Penyelesaian Sengketa Pemilu

00.00 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Pusat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tingkat pusat antara lain permohonan, verifikasi formil dan materil, diregister, mediasi, ajudikasi, berita acara, putusan, koreksi putusan

00.01 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Provinsi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tingkat provinsi antara lain permohonan, verifikasi formil dan materil, diregister, mediasi, ajudikasi, berita acara, putusan

00.02 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tingkat kabupaten/kota antara lain permohonan, verifikasi formil dan materil, diregister, mediasi, ajudikasi, berita acara, putusan

00.03 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Kecamatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa antar peserta tingkat kecamatan antara lain permohonan, verifikasi formil dan materil, diregister, musyawarah, berita acara, putusan

01 Penyelesaian Sengketa Pemilihan

01.00 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Pusat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan, pembinaan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Provinsi dan Kabupaten/kota

01.01 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Provinsi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tingkat provinsi antara lain permohonan, verifikasi formil dan materil, register, musyawarah, berita acara, putusan

01.02 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Kabupaten/ Kota

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tingkat kabupaten/kota antara lain permohonan, verifikasi formil dan materil, register, musyawarah, berita acara, putusan.

01.03 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Kecamatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa antar peserta tingkat kecamatan antara lain permohonan, verifikasi formil dan materil, register, musyawarah, berita acara, putusan.

02 Sosialisasi Penyelesaian Sengketa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

03 Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi pada proses penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan.

2. FUNGSI FASILITATIF

PR PERENCANAAN

00 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan

00.00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

00.01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

00.02 Rencana Strategis (Renstra)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum.

01 Rencana Kerja Tahunan

01.00 Usulan Rencana Kegiatan
Naskah-naskah yang berkaitan usulan rencana kegiatan unit-unit kerja termasuk KAK/RAB.

01.01 Rencana Kerja Tahunan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan/RTK unit kerja.

01.02 Rencana Kerja Tahunan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L), Rencana kerja Tahunan, Musrenbangnas, dan Rakorbangpus.

02 Penetapan Kinerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung seperti Eselon II dengan Eselon I, Eselon I dengan Ketua Bawaslu RI, Ketua Bawaslu RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

03 Penyusunan Rencana Anggaran

03.00 Penyusunan Rencana Anggaran Bawaslu

Naskah-naskah yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran Bawaslu seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan lembaga (RKAKL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional (PO), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Pendapatan Negara Bukan Pajak/ PNBPN, Standar Biaya Khusus (SBK), Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML), dan Pedoman Penyusunan Anggaran.

03.01 Revisi Dokumen Anggaran

Naskah-naskah yang berhubungan dengan revisi/ perubahan dokumen anggaran seperti revisi DIPA, PO.

04 Laporan

04.00 Laporan Berkala

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun seperti (laporan triwulan, laporan tahunan) Bawaslu.

04.01 Laporan Khusus

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan khusus, antara lain adalah laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti: Pidato Presiden, Rapat dengar pendapat dengan DPR RI.

- 04.02 Laporan Perkembangan/*Progress Report*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu atau kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun.
- 04.03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal.
- 04.04 Evaluasi Program
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum.

OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- 00 Organisasi/Struktur Organisasi Bawaslu
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembentukan, penyempurnaan/perubahan organisasi yang meliputi analisis, evaluasi, dan perumusan organisasi.
- 01 Uraian Tugas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan uraian tugas, jabatan struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum.
- 02 Analisis Jabatan dan Beban Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis, evaluasi, rentang kendali jabatan, dan beban kerja.

03 Mekanisme Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan mekanisme kerja yang meliputi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan tata kerja termasuk berkas reformasi birokrasi.

04 Ketatalaksanaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatalaksanaan termasuk pembuatan pedoman hubungan kerja yang meliputi pola hubungan antar struktural, antar fungsional, dan antara struktural dengan fungsional.

05 Reformasi Birokrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan di lingkungan Bawaslu.

06 Standar Kompetensi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi jabatan struktural dan jabatan fungsional.

06.00 Standar kompetensi jabatan struktural

Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan struktural.

06.01 Standar kompetensi jabatan fungsional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan fungsional.

07 Evaluasi Kelembagaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perubahan dan penyempurnaan organisasi/lembaga Bawaslu.

KA PERSURATAN DAN KEARSIPAN

00 Administrasi Persuratan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/ pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahannya, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/ stempel, dan pengiriman surat/ barang cetakan.

01 Kearsipan

01.00 Pembinaan Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis meliputi kegiatan pembinaan unit kearsipan ke unit pengolah, pembinaan unit kearsipan 1 ke unit kearsipan 2 atau unit kearsipan 3, pembinaan terhadap SDM kearsipan, penilaian angka kredit arsiparis tingkat instansi, lomba tertib Arsip antar unit dan bimbingan teknis kearsipan.

01.01 Penyusunan Sistem Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan dinamis, meliputi tata naskah dinas, klasifikasi arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis, dan pedoman pengelolaan Arsip dinamis.

01.02 Pemeliharaan dan Penyimpanan Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Arsip baik penyimpanan maupun pemeliharaan Arsip dinamis seperti daftar Arsip aktif, daftar Arsip inaktif, daftar Arsip vital, sarana dan prasarana penyimpanan arsip

01.03 Penggunaan Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan penggunaan/peminjaman Arsip seperti formulir/catatan penggunaan arsip, *out indikator* dll.

01.04 Penyusutan Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan Arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna dan penyerahan Arsip statis ke lembaga kearsipan.

02 Rapat/ Rakor/ Rakernis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rapat, baik rapat pimpinan, rapat koordinasi, maupun rapat kerja teknis internal Badan Pengawas Pemilihan Umum, termasuk di dalamnya notulen dan hasil pembahasannya.

KU KEUANGAN

00 Pelaksanaan Anggaran

00.00 DIPA/ POK

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran yang berupa penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), maupun revisi DIPA/ POK.

00.01 Rencana Anggaran Belanja (RAB)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan Rencana Anggaran Belanja.

00.02 Penggajian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran berupa penggajian kepada pegawai, termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya.

00.03 Pengeluaran Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran, mulai dari SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang), SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan), SPP-TUP

(Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan), Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), juklak/ mekanisme pengelolaan APBN serta Bahan Nota Keuangan.

01 Pengelolaan Perbendaharaan

01.00 Perbendaharaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa surat keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan.

01.01 KP4 (Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa KP4 yaitu surat keterangan untuk Mendapat Tunjangan Keluarga dan Surat Keterangan lainnya.

01.02 Kartu Pengawasan Kredit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa kartu pengawasan kredit anggaran.

01.03 Pajak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP).

01.04 Penerimaan Non Pajak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan penyeteroran non pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara.

- 01.05 Pengembalian Belanja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembalian belanja, berupa pengembalian belanja pegawai, barang, modal melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).
- 01.06 Berita Acara Pemeriksaan Kas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas.
- 01.07 Tuntutan Ganti Rugi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi
- 01.08 Pinjaman/Bantuan Luar Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan pinjaman/bantuan luar negeri.
- 01.09 Verifikasi Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran.
- 01.10 Pembukuan Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran yang berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) dan kartu-kartu realisasi anggaran dan kartu pengawasan realisasi anggaran.

02 Perhitungan Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan anggaran berupa: laporan keuangan, LRA, neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

03 Ketatausahaan Keuangan

03.00 Keterangan Penghasilan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa keterangan penghasilan perorangan.

03.01 SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran).

03.02 Permohonan Pinjaman

Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan yang berupa permohonan pinjaman.

03.03 Iuran Keanggotaan Organisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi baik tingkat nasional maupun internasional mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran anggota sampai laporan.

PL PERLENGKAPAN

00 Analisa Kebutuhan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan analisa kebutuhan dari unit kerja.

01 Tata Ruang

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang kantor.

02 Daftar Perkenalan Mampu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkenalan dan penawaran untuk menjadi rekanan Bawaslu.

03 Pengadaan

03.00 Alat Tulis Kantor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan alat tulis kantor dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima.

03.01 Perlengkapan Kantor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan perlengkapan kantor seperti meja, kursi, lemari, rak filing kabinet, brankas, dan lain sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima.

03.02 Tanah dan Bangunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah dan bangunan kantor termasuk bukti kepemilikan asset/ kekayaan (sertifikat, IMB), dan rumah dinas dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

03.03 Kendaraan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan beroda dua atau beroda empat termasuk bukti kepemilikan (BPKP, STNK) dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

03.04 Instalasi/ Jaringan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan instalasi listrik, air, telepon, Local Area Network (LAN), dan sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

03.05 Peralatan Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan peralatan kearsipan seperti perangkat laboratorium, boks, rak, film, dan lain lain dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima.

04 Pemanfaatan Barang

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan barang antara lain hibah/bantuan/pinjaman, sewa, tukar menukar.

05 Penyimpanan dan distribusi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran/distribusi barang untuk kepentingan internal dan eksternal.

06 Pemeliharaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi, perbaikan/service kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor.

07 Inventarisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi barang milik negara (BMN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, termasuk buku inventaris.

08 Penghapusan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang sejak persiapan/ pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan sampai pelaporan termasuk berita acaranya.

09 Dokumen Aset

Naskah-naskah yang berkaitan dengan bukti kepemilikan aset Bawaslu.

HK HUKUM

00 Program Legislasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program pembentukan peraturan perundangan lembaga/pemerintah.

01 Produk Hukum

01.00 Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur seperti peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, instruksi, prosedur tetap atau prosedur operasional standar, dan/atau surat edaran bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu, antara lain; persiapan, analisa, penyusunan, pengkoordinasian, perumusan, pembahasan, uji publik sampai dengan pengesahannya.

01.01 Produk Hukum yang Bersifat Penetapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan, yaitu keputusan tentang penetapan kegiatan dan keputusan tentang penetapan pelaksana kegiatan bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu sejak awal proses hingga penandatanganan.

02 Perjanjian Kerjasama

02.00 Kerjasama Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama dalam negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama.

02.01 Kerjasama Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama luar negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama.

03 Advokasi Hukum

03.00 Advokasi Hukum Kasus Perdata

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum perdata di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

03.01 Advokasi Hukum Kasus Pidana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum pidana di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

03.02 Advokasi Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum TUN di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

03.03 Advokasi Hukum Perkara Perselisihan Hasil

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian advokasi hukum dalam perkara perselisihan hasil di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

03.04 Advokasi Hukum Perkara Kode Etik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian advokasi hukum dalam perkara kode etik di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

03.05 Advokasi Hukum Perkara Uji Materiil

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian advokasi hukum dalam perkara uji materiil di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

- 03.06 Advokasi Hukum dalam Pengaduan dan Konsultasi Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian advokasi hukum dalam pengaduan dan konsultasi hukum di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
- 03.07 Advokasi Hukum dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian advokasi hukum dalam alternatif penyelesaian sengketa di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
- 04 Telaah Hukum
- 04.00 Telaah Hukum Internal
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk internal Bawaslu.
- 04.01 Telaah Hukum Eksternal
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk eksternal Bawaslu.
- 05 Sosialisasi Hukum
- 05.00 Sosialisasi Hukum Tingkat Pusat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan di tingkat Pusat.

05.01 Sosialisasi Hukum Tingkat Provinsi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan di tingkat Provinsi.

05.02 Sosialisasi Hukum Tingkat Kabupaten/Kota

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan di tingkat Kabupaten/Kota.

06 Dokumentasi Hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum, perluasan, dan penyebaran informasi hukum.

07 Hak Atas Kekayaan Intelektual

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pengurusan masalah HAKI sampai dengan penyelesaian masalah HAKI.

08 Kasus Hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus hukum baik hukum pidana, perdata, peradilan tata usaha negara, perselisihan hasil, kode etik, uji materiil, pengaduan dan konsultasi hukum, dan alternatif penyelesaian sengketa oleh Bawaslu.

HM HUBUNGAN MASYARAKAT

00 Penerangan dan Publikasi

00.00 Penerangan dan Publikasi tingkat Pusat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, wartawan, konferensi pers/ press realese, media masa (televisi,

radio, surat kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik di tingkat Pusat.

00.01 Penerangan dan Publikasi tingkat Provinsi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, wartawan, konferensi pers/ press realese, media masa (televisi, radio, surat kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik di tingkat Provinsi.

00.02 Penerangan dan Publikasi tingkat Kabupaten/Kota

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, wartawan, konferensi pers/ press realese, media masa (televisi, radio, surat kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik di tingkat Kabupaten/Kota.

01 Dengar pendapat/ *hearing* DPR

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengar pendapat/ *hearing* dengan DPR.

02 Hubungan Antar Lembaga

02.00 Lembaga Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah.

- 02.01 Organisasi Pemantau Pemilu Nasional dan Internasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Internasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan organisasi Pemantau Pemilu.
- 02.02 Perusahaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan pihak perusahaan (Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta).
- 02.03 Organisasi Kemasyarakatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan organisasi kemasyarakatan.
- 02.04 Perguruan Tinggi/ Sekolah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan perguruan tinggi/ sekolah termasuk orientasi lapangan dan praktek kerja lapangan (PKL).
- 02.05 Bakohumas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Bakohumas).
- 03 Keprotokolan
- 03.00 Upacara/ Acara Kedinasan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan.

03.01 Kunjungan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri dan kunjungan dari masyarakat.

03.02 Agenda Pimpinan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pelaksanaan agenda pimpinan seperti agenda rapat pimpinan.

04 Dokumentasi dan Penerbitan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi (pemotretan dan *shooting*) dan penerbitan buletin/majalah/jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran.

05 Penghargaan/ Tanda Kenang-kenangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan serta kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

06 Ucapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa, dan ucapan permohonan maaf.

07 Sosialisasi Humas, Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan

07.00 Sosialisasi Humas, Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan tingkat Pusat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi humas, hubungan antar lembaga, dan keprotokolan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu tingkat Pusat.

- 07.01 Sosialisasi Humas, Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan tingkat Provinsi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi humas, hubungan antar lembaga, dan keprotokolan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu tingkat Provinsi.
- 07.02 Sosialisasi Humas, Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan tingkat Kabupaten/Kota
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi humas, hubungan antar lembaga, dan keprotokolan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu tingkat Kabupaten/Kota.

KP KEPEGAWAIAN

00 Formasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengadaan calon pegawai, mulai dari pengumpulan bahan untuk penyusunan rencana formasi, termasuk rencana penempatan pegawai dan rencana penetapan klasifikasi pendidikan sampai dengan persetujuan formasi.

01 Pengadaan

01.00 Penerimaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, test sampai dengan pengumuman penerimaan.

01.01 Pengangkatan CPNS dan PNS

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan CPNS, pengangkatan CPNS menjadi PNS mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan.

- 01.02 Prajabatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan prajabatan.

- 01.03 Penempatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan CPNS dan PNS di unit-unit kerja.

- 02 Ujian Kenaikan Pangkat/ Jabatan
 - 02.00 Ujian Penyesuaian Ijazah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS.

 - 02.01 Ujian Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi PNS.

 - 02.02 Ujian Kompetensi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian kompetensi untuk kenaikan jabatan.

- 03 Mutasi
 - 03.00 Kenaikan Pangkat/ Golongan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/ golongan pegawai.

 - 03.01 Kenaikan Gaji Berkala
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala pegawai.

 - 03.02 Penyesuaian Masa Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji.

- 03.03 Penyesuaian Tunjangan Keluarga
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga.
 - 03.04 Promosi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan promosi jabatan.
 - 03.05 Rotasi Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rotasi kerja dalam rangka pementapan tugas.
 - 03.06 Alih Tugas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas seperti mutasi antar instansi, pegawai yang dipekerjakan, pegawai yang diperbantukan.
- 04 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan
- 04.00 Pengangkatan Jabatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural maupun fungsional termasuk di dalamnya pelantikan.
 - 04.01 Pemberhentian Jabatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dari jabatan struktural maupun fungsional.
- 05 Pendelegasian Wewenang
- 05.00 Pelaksana Tugas (Plt)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik.

- 05.01 Pelaksana Harian (Plh)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan).

06 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

- 06.00 Program Diploma
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan diploma mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program diploma.
- 06.01 Program Sarjana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program sarjana.
- 06.02 Program Pasca Sarjana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan pasca sarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program pasca sarjana.
- 06.03 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan penjenjangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan diklat penjenjangan pegawai dari tingkat eselon I sampai dengan tingkat eselon IV.
- 06.04 Kursus/ Diklat Fungsional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/diklat fungsional mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kursus/ diklat fungsional.

06.05 Kursus/ Diklat Teknis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/ diklat teknis mulai dari perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kursus/ diklat teknis.

07 Administrasi Pegawai

07.00 Data/ Keterangan Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk presensi pegawai.

07.01 Kartu Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai.

07.02 Karis/ Karsu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu).

07.03 Kartu Taspen

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu Taspen.

07.04 Kartu Askes

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan tentang Askes.

07.05 Tanda Jasa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada pegawai Bawaslu.

08 Pembinaan Pegawai

08.00 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

- 08.01 SKP (Satuan Kinerja Pegawai)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai.
- 08.02 Pembinaan Mental
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan mental pegawai termasuk didalamnya ceramah keagamaan.
- 08.03 Hukuman Disiplin
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman disiplin pegawai yang meliputi teguran lisan/ tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan/ penurunan pangkat/ golongan dan pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.
- 09 Pembinaan Jabatan Fungsional
- 09.00 Jabatan Fungsional Arsiparis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Arsiparis, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
- 09.01 Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional analisis kepegawaian, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
- 09.02 Jabatan Fungsional Widyaiswara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional widyaiswara, sejak usulan pengangkatan,

penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.

09.03 Jabatan Fungsional Peneliti

Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional peneliti, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.

09.04 Jabatan Fungsional Perencana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional perencana, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.

09.05 Jabatan Fungsional Perancang Undang-Undang

Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional perancang Undang-undang, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.

09.06 Jabatan Fungsional Auditor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional auditor, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.

09.07 Jabatan Fungsional Pustakawan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pustakawan, sejak usul pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan.

09.08 Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pranata komputer, sejak usul pengangkatan,

penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan.

09.09 Jabatan fungsional Pranata Humas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pranata humas, sejak usul pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan.

09.10 Jabatan Fungsional Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional lainnya, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.

10 Kesejahteraan

10.00 Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai, *general check up* pejabat.

10.01 Cuti

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak cuti pegawai yang meliputi cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, dan cuti di luar tanggungan negara.

10.02 Rekreasi/ Kesenian/ Olahraga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekreasi, kesenian, dan olahraga.

10.03 Bantuan Sosial

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk di dalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, sumbangan-sumbangan lainnya.

10.04 Perumahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumahan pegawai Bawaslu.

11 Pemberhentian Pegawai

11.00 Dengan Hormat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dengan hormat, baik atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri, baik dengan hak pensiun maupun tidak, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya SK pensiun termasuk didalamnya pensiun/ duda/ janda/ anak dan Taspen.

11.01 Tidak Dengan Hormat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mulai dari pengajuan, proses pemberhentian sampai dikeluarkannya SK pemberhentian.

12 Organisasi Non Kedinasan

12.00 KORPRI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI Bawaslu.

12.01 Dharma Wanita

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dharma wanita Bawaslu.

12.02 Koperasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koperasi Bawaslu.

12.03 Yayasan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan Bawaslu.

12.04 Asosiasi Arsiparis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi Asosiasi Arsiparis.

RT KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

00 Perjalanan Dinas Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar negeri termasuk pengurusan *passport*, visa, dan tiket pesawat.

01 Fasilitas

01.00 Kendaraan Dinas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti: formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas, laporan kehilangan kendaraan.

01.01 Ruang Rapat/ Konsumsi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya.

01.02 Telekomunikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telekomunikasi (telepon).

02 Risalah/Notulen Rapat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil kegiatan rapat baik dalam kegiatan rapat rutin internal, rapat eksternal, rapat pimpinan/pleno, antara lain; risalah, notulen, bahan rapat dll.

03 Pengamanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan lingkungan kantor seperti daftar piket satpam/*security*, buku/formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan

kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan pengaturan parkir termasuk kartu parkir.

04 Pemeliharaan Gedung dan Taman

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan gedung dan taman kantor Bawaslu.

05 Pengelolaan Jaringan Fasilitas Kantor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan jaringan fasilitas kantor, antara lain; jaringan listrik, air, telepon, internet.

06 Administrasi Pakaian Dinas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi fasilitas pakaian dinas bagi pegawai Bawaslu.

PW PENGAWASAN

00 Perencanaan Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana strategis pengawasan, rencana kinerja tahunan pengawasan internal Bawaslu.

01 Audit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit seperti audit operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit BMN, serta kegiatan audit lainnya yang meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.

02 Reviu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu atas pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.

03 Evaluasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi atas kegiatan seperti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

serta evaluasi kegiatan lainnya meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.

04 Pengaduan Masyarakat

04.00 Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan-pengaduan masyarakat yang datang dari internal Bawaslu sampai dengan laporan penyelesaiannya.

04.01 Eksternal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan-pengaduan masyarakat yang datang dari eksternal Bawaslu sampai dengan laporan penyelesaiannya.

05 Asistensi dan Konsultasi Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan asistensi dan konsultasi pengawasan internal.

06 Pengawasan Melekat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan melekat, proses pemeriksaan pengawasan sampai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, termasuk pakta integritas.

07 Laporan Hasil Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Bawaslu semesteran dan tahunan baik yang disampaikan ke Kementerian PAN dan RB, BPKP, dan UKP4, serta tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

08 Pemantauan

08.00 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/ Program

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu program/ kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya kegiatan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Bawaslu.

08.01 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/ Tuntutan Ganti Rugi (TGR) seperti: Laporan kehilangan, berita acara kehilangan barang/ uang, SK tanggung jawab mutlak/ surat kesanggupan untuk mengganti ke Kas Negara, SK penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian TP-TGR.

08.02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemantauan LHP BPK RI, atau LHP lainnya yang ditindak lanjuti sampai dengan pelaporan.

08.03 Penerapan Early Warning System

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan.

08.04 Pemantauan Disiplin Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai di Lingkungan Bawaslu sampai dengan laporan.

09 Kegiatan Pengawasan Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan, diklat pengawasan, bimbingan dan konsultasi pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, keikutsertaan dalam Forbes APIP dan forum komunikasi lainnya.

TI TEKNOLOGI INFORMASI

00 Rencana Strategis/Master Plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)

01 Dokumen Arsitektur

- 01.00 Sistem Informasi.
- 01.01 Sistem Aplikasi.
- 01.02 Infrastruktur.

02 Dokumentasi Implementasi

- 02.00 Sistem Informasi.
- 02.01 Sistem Aplikasi.
- 02.02 Infrastruktur.

03 Perekam dan Pemutakhiran Data

- 03.00 Formulir Isian.
- 03.01 Daftar Petugas Perekaman.
- 03.02 Jadwal Pelaksanaan.
- 03.03 Laporan Hasil Perekaman dan Pemutakhiran Data.

04 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data

- 04.00 Perencanaan Migrasi.
- 04.01 Pelaksanaan Migrasi.
- 04.02 Berita Acara Kegiatan Migrasi.
- 04.03 Daftar Sistem Aplikasi dan Data yang Imigrasi.

05 Dokumen Hosting

- 05.00 Formulir Permintaan Hosting.
- 05.01 Laporan Hasil Uji Kelayakan.
- 05.02 Laporan Pelaksanaan Hosting.

07 Layanan Back-up Data Digital

B. KODE SATUAN KERJA

1. PUSAT

- a. Ketua = K1
- b. Sekretaris Jenderal = SJ
- c. Deputi = DI
- d. Inspektur Utama = IU
- e. Kepala Biro = KB
- f. Inspektur = IP
- g. Kepala Pusat = KT

2. DAERAH

- a. Ketua = K
- b. Sekretariat = (langsung menggunakan kode daerah)

DAERAH	KODE
a. PROVINSI ACEH	a. AC
1) Kabupaten Aceh Barat	1) AC-01
2) Kabupaten Aceh Barat Daya	2) AC-02
3) Kabupaten Aceh Besar	3) AC-03
4) Kabupaten Aceh Jaya	4) AC-04
5) Kabupaten Aceh Selatan	5) AC-05
6) Kabupaten Aceh Singkil	6) AC-06
7) Kabupaten Aceh Tamiang	7) AC-07
8) Kabupaten Aceh Tengah	8) AC-08
9) Kabupaten Aceh Tenggara	9) AC-09
10) Kabupaten Aceh Timur	10) AC-10
11) Kabupaten Aceh Utara	11) AC-11
12) Kabupaten Bener Meriah	12) AC-12
13) Kabupaten Bireun	13) AC-13
14) Kabupaten Gayo Lues	14) AC-14
15) Kabupaten Nagan Raya	15) AC-15
16) Kabupaten Pidie	16) AC-16
17) Kabupaten Pidie Jaya	17) AC-17
18) Kabupaten Simeulue	18) AC-18
19) Kota Banda Aceh	19) AC-19

DAERAH	KODE
20) Kota Subulussalam	20) AC-20
21) Kota Langsa	21) AC-21
22) Kota Lhokseumawe	22) AC-22
23) Kota Sabang	23) AC-23
b. PROVINSI SUMATERA UTARA	b. SU
1) Kabupaten Asahan	1) SU-01
2) Kabupaten Batubara	2) SU-02
3) Kabupaten Dairi	3) SU-03
4) Kabupaten Deli Serdang	4) SU-04
5) Kabupaten Humbang Hasundutan	5) SU-05
6) Kabupaten Karo	6) SU-06
7) Kabupaten Labuhanbatu	7) SU-07
8) Kabupaten Labuhanbatu Selatan	8) SU-08
9) Kabupaten Labuhanbatu Utara	9) SU-09
10) Kabupaten Langkat	10) SU-10
11) Kabupaten Mandailing Natal	11) SU-11
12) Kabupaten Nias	12) SU-12
13) Kabupaten Nias Barat	13) SU-13
14) Kabupaten Nias Selatan	14) SU-14
15) Kabupaten Nias Utara	15) SU-15
16) Kabupaten Padang Lawas	16) SU-16
17) Kabupaten Padang Lawas Utara	17) SU-17
18) Kabupaten Pakpak Bharat	18) SU-18
19) Kabupaten Samosir	19) SU-19
20) Kabupaten Serdang Bedag	20) SU-20
21) Kabupaten Simalungun Raya	21) SU-21
22) Kabupaten Tapanuli Selatan	22) SU-22
23) Kabupaten Tapanuli Tengah	23) SU-23
24) Kabupaten Tapanuli Utara	24) SU-24
25) Kabupaten Toba Samosir	25) SU-25
26) Kota Binjai	26) SU-26
27) Kota Gunung Sitoli	27) SU-27
28) Kota Medan	28) SU-28

DAERAH	KODE
29) Kota Padangsidempuan 30) Kota Pematangsiantar 31) Kota Sibolga 32) Kota Tanjungbalai 33) Kota Tebing Tinggi	29) SU-29 30) SU-30 31) SU-31 32) SU-32 33) SU-33
c. PROVINSI SUMATERA BARAT 1) Kabupaten Agam 2) Kabupaten Dharmasraya 3) Kabupaten Kepulauan Mentawai 4) Kabupaten Lima Puluh Kota 5) Kabupaten Padang Pariaman 6) Kabupaten Pasaman 7) Kabupaten Pasaman Barat 8) Kabupaten Pesisir Selatan 9) Kabupaten Sijunjung 10) Kabupaten Solok 11) Kabupaten Solok Selatan 12) Kabupaten Tanah Datar 13) Kota Bukittinggi 14) Kota Padang 15) Kota Padangpanjang 16) Kota Pariaman 17) Kota Payakumbuh 18) Kota Sawahlunto 19) Kota Solok	c. SB 1) SB-01 2) SB-02 3) SB-03 4) SB-04 5) SB-05 6) SB-06 7) SB-07 8) SB-08 9) SB-09 10) SB-10 11) SB-11 12) SB-12 13) SB-13 14) SB-14 15) SB-15 16) SB-16 17) SB-17 18) SB-18 19) SB-19
d. PROVINSI JAMBI 1) Kabupaten Batang Hari 2) Kabupaten Bungo 3) Kabupaten Kerinci 4) Kabupaten Merangin 5) Kabupaten Muaro Jambi 6) Kabupaten Sarolangun 7) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	d. JA 1) JA-01 2) JA-02 3) JA-03 4) JA-04 5) JA-05 6) JA-06 7) JA-07

DAERAH	KODE
8) Kabupaten Tanjung Timur 9) Kabupaten Tebo 10) Kota Jambi 11) Kota Sungai Penuh	8) JA-08 9) JA-09 10) JA-10 11) JA-11
e. PROVINSI RIAU 1) Kabupaten Bengkalis 2) Kabupaten Indragiri Hilir 3) Kabupaten Indragiri Hulu 4) Kabupaten Kampar 5) Kabupaten Kuantan Singingi 6) Kabupaten Pelalawan 7) Kabupaten Rokan Hulu 8) Kabupaten Rokan Hilir 9) Kabupaten Siak 10) Kabupaten Kep. Meranti 11) Kota Pekanbaru 12) Kota Dumai	e. RA 1) RA-01 2) RA-02 3) RA-03 4) RA-04 5) RA-05 6) RA-06 7) RA-07 8) RA-08 9) RA-09 10) RA-10 11) RA-11 12) RA-12
f. PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1) Kabupaten Karimun 2) Kabupaten Bintan (Kep. Riau) 3) Kabupaten Lingga 4) Kabupaten Natuna 5) Kabupaten Kep. Anambas 6) Kota Tanjungpinang 7) Kota Batam	f. KR 1) KR-01 2) KR-02 3) KR-03 4) KR-04 5) KR-05 6) KR-06 7) KR-07
g. PROVINSI SUMATERA SELATAN 1) Kabupaten Banyuasin 2) Kabupaten Empat Lawang 3) Kabupaten Lahat 4) Kabupaten Muara Enim 5) Kabupaten Musi Banyuasin 6) Kabupaten Musi Rawas 7) Kabupaten Musi Rawas Utara 8) Kabupaten Ogan Ilir 9) Kabupaten Ogan Komering Ilir	g. SS 1) SS-01 2) SS-02 3) SS-03 4) SS-04 5) SS-05 6) SS-06 7) SS-07 8) SS-08 9) SS-09

DAERAH	KODE
10) Kabupaten Ogan Komering Ulu 11) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 12) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 13) Kabupaten Penakal Abab Lematang Ilir 14) Kota Lubuklinggau 15) Kota Pagar Alam 16) Kota Palembang 17) Kota Prabumulih	10) SS-10 11) SS-11 12) SS-12 13) SS-13 14) SS-14 15) SS-15 16) SS-16 17) SS-17
h. PROVINSI BANGKA BELITUNG 1) Kabupaten Bangka 2) Kabupaten Bangka Barat 3) Kabupaten Bangka Selatan 4) Kabupaten Bangka Tengah 5) Kabupaten Belitung 6) Kabupaten Belitung Timur 7) Kota Pangkalpinang	h. BB 1) BB-01 2) BB-02 3) BB-03 4) BB-04 5) BB-05 6) BB-06 7) BB-07
i. PROVINSI BENGKULU 1) Kabupaten Bengkulu Selatan 2) Kabupaten Bengkulu Tengah 3) Kabupaten Bengkulu Utara 4) Kabupaten Kaur 5) Kabupaten Kepahiang 6) Kabupaten Lebong 7) Kabupaten Mukomuko 8) Kabupaten Rejang Lebong 9) Kabupaten Seluma 10) Kota Bengkulu	i. BE 1) BE-01 2) BE-02 3) BE-03 4) BE-04 5) BE-05 6) BE-06 7) BE-07 8) BE-08 9) BE-09 10) SU-10
j. PROVINSI LAMPUNG 1) Kabupaten Lampung Barat 2) Kabupaten Lampung Selatan 3) Kabupaten Lampung Tengah 4) Kabupaten Lampung Timur	j. LA 1) LA-01 2) LA-02 3) LA-03 4) LA-04

DAERAH	KODE
5) Kabupaten Lampung Utara 6) Kabupaten Mesuji 7) Kabupaten Pesawaran 8) Kabupaten Tanggamus 9) Kabupaten Tulang Bawang 10) Kabupaten Tulang Bawang Barat 11) Kabupaten Way Kanan 12) Kabupaten Pesisir Barat 13) Kabupaten Pringsewu 14) Kota Bandar Lampung 15) Kota Metro	5) LA-05 6) LA-06 7) LA-07 8) LA-08 9) LA-09 10) LA-10 11) LA-11 12) LA-12 13) LA-13 14) LA-14 15) LA-15
k. PROVINSI BANTEN 1) Kabupaten Lebak 2) Kabupaten Pandeglang 3) Kabupaten Serang 4) Kabupaten Tangerang 5) Kota Cilegon 6) Kota Serang 7) Kota Tangerang 8) Kota Tangerang Selatan	k. BT 1) BT-01 2) BT-02 3) BT-03 4) BT-04 5) BT-05 6) BT-06 7) BT-07 8) BT-08
l. PROVINSI DKI JAKARTA 1) Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu 2) Kota Administratif Jakarta Barat 3) Kota Administratif Jakarta Pusat 4) Kota Administratif Jakarta Selatan 5) Kota Administratif Jakarta Timur 6) Kota Administratif Jakarta Utara	l. JK 1) JK-01 2) JK-02 3) JK-03 4) JK-04 5) JK-05 6) JK-06

DAERAH	KODE
m. PROVINSI JAWA BARAT 1) Kabupaten Bandung 2) Kabupaten Bandung Barat 3) Kabupaten Bekasi 4) Kabupaten Bogor 5) Kabupaten Ciamis 6) Kabupaten Cianjur 7) Kabupaten Cirebon 8) Kabupaten Garut 9) Kabupaten Indramayu 10) Kabupaten Karawang 11) Kabupaten Kuningan 12) Kabupaten Majalengka 13) Kabupaten Pangandaran 14) Kabupaten Purwakarta 15) Kabupaten Subang 16) Kabupaten Sukabumi 17) Kabupaten Sumedang 18) Kabupaten Tasikmalaya 19) Kota Bandung 20) Kota Banjar 21) Kota Bekasi 22) Kota Bogor 23) Kota Cimahi 24) Kota Cirebon 25) Kota Depok 26) Kota Sukabumi 27) Kota Tasikmalaya	m. JB 1) JB-01 2) JB-02 3) JB-03 4) JB-04 5) JB-05 6) JB-06 7) JB-07 8) JB-08 9) JB-09 10) JB-10 11) JB-11 12) JB-12 13) JB-13 14) JB-14 15) JB-15 16) JB-16 17) JB-17 18) JB-18 19) JB-19 20) JB-20 21) JB-21 22) JB-22 23) JB-23 24) JB-24 25) JB-25 26) JB-26 27) JB-27
n. PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 1) Kabupaten Bantul 2) Kabupaten Gunung Kidul 3) Kabupaten Kulonprogo 4) Kabupaten Sleman 5) Kota Yogyakarta	n. YO 1) YO-01 2) YO-02 3) YO-03 4) YO-04 5) YO-05

DAERAH	KODE
o. PROVINSI JAWA TENGAH	o. JT
1) Kabupaten Banjarnegara	1) JT-01
2) Kabupaten Banyumas	2) JT-02
3) Kabupaten Batang	3) JT-03
4) Kabupaten Blora	4) JT-04
5) Kabupaten Boyolali	5) JT-05
6) Kabupaten Brebes	6) JT-06
7) Kabupaten Cilacap	7) JT-07
8) Kabupaten Demak	8) JT-08
9) Kabupaten Grobogan	9) JT-09
10) Kabupaten Jepara	10) JT-10
11) Kabupaten Karanganyar	11) JT-11
12) Kabupaten Kebumen	12) JT-12
13) Kabupaten Kendal	13) JT-13
14) Kabupaten Klaten	14) JT-14
15) Kabupaten Kudus	15) JT-15
16) Kabupaten Magelang	16) JT-16
17) Kabupaten Pati	17) JT-17
18) Kabupaten Pekalongan	18) JT-18
19) Kabupaten Pemalang	19) JT-19
20) Kabupaten Purbalingga	20) JT-20
21) Kabupaten Purworejo	21) JT-21
22) Kabupaten Rembang	22) JT-22
23) Kabupaten Semarang	23) JT-23
24) Kabupaten Sragen	24) JT-24
25) Kabupaten Sukoharjo	25) JT-25
26) Kabupaten Tegal	26) JT-26
27) Kabupaten Temanggung	27) JT-27
28) Kabupaten Wonogiri	28) JT-28
29) Kabupaten Wonosobo	29) JT-29
30) Kota Magelang	30) JT-30
31) Kota Pekalongan	31) JT-31
32) Kota Salatiga	32) JT-32
33) Kota Semarang	33) JT-33

DAERAH	KODE
34) Kota Surakarta	34) JT-34
35) Kota Tegal	35) JT-35
p. PROVINSI JAWA TIMUR	p. JI
1) Kabupaten Kabupaten Bangkalan	1) JI-01
2) Kabupaten Banyuwangi	2) JI-02
3) Kabupaten Blitar	3) JI-03
4) Kabupaten Bojonegoro	4) JI-04
5) Kabupaten Bondowoso	5) JI-05
6) Kabupaten Gresik	6) JI-06
7) Kabupaten Jember	7) JI-07
8) Kabupaten Jombang	8) JI-08
9) Kabupaten Kediri	9) JI-09
10) Kabupaten Lumajang	10) JI-10
11) Kabupaten Lamongan	11) JI-11
12) Kabupaten Madiun	12) JI-12
13) Kabupaten Magetan	13) JI-13
14) Kabupaten Malang	14) JI-14
15) Kabupaten Mojokerto	15) JI-15
16) Kabupaten Nganjuk	16) JI-16
17) Kabupaten Ngawi	17) JI-17
18) Kabupaten Pacitan	18) JI-18
19) Kabupaten Pamekasan	19) JI-19
20) Kabupaten Pasuruan	20) JI-20
21) Kabupaten Ponorogo	21) JI-21
22) Kabupaten Probolinggo	22) JI-22
23) Kabupaten Sampang	23) JI-23
24) Kabupaten Sidoarjo	24) JI-24
25) Kabupaten Situbondo	25) JI-25
26) Kabupaten Sumenep	26) JI-26
27) Kabupaten Trenggalek	27) JI-27
28) Kabupaten Tuban	28) JI-28
29) Kabupaten Tulungagung	29) JI-29
30) Kota Batu	30) JI-30
31) Kota Blitar	31) JI-31

DAERAH	KODE
32) Kota Kediri 33) Kota Madiun 34) Kota Malang 35) Kota Mojokerto 36) Kota Pasuruan 37) Kota Probolinggo 38) Kota Surabaya	32) JI-32 33) JI-33 34) JI-34 35) JI-35 36) JI-36 37) JI-37 38) JI-38
q. PROVINSI BALI 1) Kabupaten Badung 2) Kabupaten Bangli 3) Kabupaten Buleleng 4) Kabupaten Gianyar 5) Kabupaten Jembrana 6) Kabupaten Karangasem 7) Kabupaten Klungkung 8) Kabupaten Tabanan 9) Kota Denpasar	q. BA 1) BA-01 2) BA-02 3) BA-03 4) BA-04 5) BA-05 6) BA-06 7) BA-07 8) BA-08 9) BA-09
r. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1) Kabupaten Bima 2) Kabupaten Dompu 3) Kabupaten Lombok Barat 4) Kabupaten Lombok Tengah 5) Kabupaten Lombok Timur 6) Kabupaten Lombok Utara 7) Kabupaten Sumbawa 8) Kabupaten Sumbawa Barat 9) Kota Bima 10) Kota Mataram	r. NB 1) NB-01 2) NB-02 3) NB-03 4) NB-04 5) NB-05 6) NB-06 7) NB-07 8) NB-08 9) NB-09 10) NB-10
s. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1) Kabupaten Alor 2) Kabupaten Belu 3) Kabupaten Ende 4) Kabupaten Flores Timur 5) Kabupaten Kupang 6) Kabupaten Lembata	s. NT 1) NT-01 2) NT-02 3) NT-03 4) NT-04 5) NT-05 6) NT-06

DAERAH	KODE
7) Kabupaten Malaka 8) Kabupaten Manggarai 9) Kabupaten Manggarai Barat 10) Kabupaten Manggarai Timur 11) Kabupaten Ngada 12) Kabupaten Nagekeo 13) Kabupaten Rote Ndao 14) Kabupaten Sabu Raijua 15) Kabupaten Sikka 16) Kabupaten Sumba Barat 17) Kabupaten Sumba Barat Daya 18) Kabupaten Sumba Tengah 19) Kabupaten Sumba Timur 20) Kabupaten Timor Tengah Utara 21) Kabupaten Timor Tengah Selatan 22) Kota Kupang	7) NT-07 8) NT-08 9) NT-09 10) NT-10 11) NT-11 12) NT-12 13) NT-13 14) NT-14 15) NT-15 16) NT-16 17) NT-17 18) NT-18 19) NT-19 20) NT-20 21) NT-21 22) NT-22
t. PROVINSI KALIMANTAN UTARA 1) Kabupaten Bulungan 2) Kabupaten Malinau 3) Kabupaten Nunukan 4) Kabupaten Tana Tidung 5) Kota Tarakan	t. KL 1) KL-01 2) KL-02 3) KL-03 4) KL-04 5) KL-05
u. PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1) Kabupaten Bengkayang 2) Kabupaten Kapuas Hulu 3) Kabupaten Ketapang 4) Kabupaten Kayong Utara 5) Kabupaten Kubu Raya 6) Kabupaten Landak 7) Kabupaten Melawi 8) Kabupaten Mempawah 9) Kabupaten Sambas 10) Kabupaten Sanggau 11) Kabupaten Sintang	u. KN 1) KN-01 2) KN-02 3) KN-03 4) KN-04 5) KN-05 6) KN-06 7) KN-07 8) KN-08 9) KN-09 10) KN-10 11) KN-11

DAERAH	KODE
12) Kabupaten Sekadau	12) KN-12
13) Kota Pontianak	13) KN-13
14) Kota Singkawang	14) KN-14
v. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	v. KS
1) Kabupaten Balangan	1) KS-01
2) Kabupaten Banjar	2) KS-02
3) Kabupaten Barito Kuala	3) KS-03
4) Kabupaten Hulu Sungai Selatan	4) KS-04
5) Kabupaten Hulu Sungai Tengah	5) KS-05
6) Kabupaten Hulu Sungai Utara	6) KS-06
7) Kabupaten Kotabaru	7) KS-07
8) Kabupaten Tabalong	8) KS-08
9) Kabupaten Tanah Bumbu	9) KS-09
10) Kabupaten Tanah Laut	10) KS-10
11) Kabupaten Tapin	11) KS-11
12) Kota Banjarbaru	12) KS-12
13) Kota Banjarmasin	13) KS-13
w. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	w. KH
1) Kabupaten Barito Selatan	1) KH-01
2) Kabupaten Barito Timur	2) KH-02
3) Kabupaten Barito Utara	3) KH-03
4) Kabupaten Gunung Mas	4) KH-04
5) Kabupaten Kapuas	5) KH-05
6) Kabupaten Katingan	6) KH-06
7) Kabupaten Kotawaringin Barat	7) KH-07
8) Kabupaten Kotawaringin Timur	8) KH-08
9) Kabupaten Lamandau	9) KH-09
10) Kabupaten Seruyan	10) KH-10
11) Kabupaten Sukamara	11) KH-11
12) Kabupaten Pulang Pisau	12) KH-12
13) Kabupaten Murung Raya	13) KH-13
14) Kota Palangka Raya	14) KH-14

DAERAH	KODE
x. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	x. KI
1) Kabupaten Berau	1) KI-01
2) Kabupaten Kutai Barat	2) KI-02
3) Kabupaten Kutai Kartanegara	3) KI-03
4) Kabupaten Kutai Timur	4) KI-04
5) Kabupaten Paser	5) KI-05
6) Kabupaten Penajam Paser Utara	6) KI-06
7) Kabupaten Mahakam Ulu	7) KI-07
8) Kota Balikpapan	8) KI-08
9) Kota Bontang	9) KI-09
10) Kota Samarinda	10) KI-10
y. PROVINSI SULAWESI UTARA	y. SA
1) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1) SA-01
2) Kabupaten Bolaang Mongondow	2) SA-02
3) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	3) SA-03
4) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	4) SA-04
5) Kabupaten Kepulauan Sangihe	5) SA-05
6) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	6) SA-06
7) Kabupaten Kepulauan Talaud	7) SA-07
8) Kabupaten Minahasa	8) SA-08
9) Kabupaten Minahasa Selatan	9) SA-09
10) Kabupaten Minahasa Tenggara	10) SA-10
11) Kabupaten Minahasa Utara	11) SA-11
12) Kota Bitung	12) SA-12
13) Kota Kotamobagu	13) SA-13
14) Kota Manado	14) SA-14
15) Kota Tomohon	15) SA-15
z. PROVINSI SULAWESI TENGAH	z. ST
1) Kabupaten Banggai	1) ST-01
2) Kabupaten Banggai Kepulauan	2) ST-02
3) Kabupaten Banggai Laut	3) ST-03

DAERAH	KODE
4) Kabupaten Buol	4) ST-04
5) Kabupaten Donggala	5) ST-05
6) Kabupaten Morowali	6) ST-06
7) Kabupaten Morowali Utara	7) ST-07
8) Kabupaten Parigi Moutong	8) ST-08
9) Kabupaten Poso	9) ST-09
10) Kabupaten Sigi	10) ST-10
11) Kota Palu	11) ST-11
12) Kabupaten Tojo Una-Una	12) ST-12
13) Kabupaten Toli-Toli	13) ST-13
aa. PROVINSI SULAWESI TENGGARA	aa. SG
1) Kabupaten Bombana	1) SG-01
2) Kabupaten Buton	2) SG-02
3) Kabupaten Buton Selatan	3) SG-03
4) Kabupaten Buton Tengah	4) SG-04
5) Kabupaten Buton Utara	5) SG-05
6) Kabupaten Kolaka	6) SG-06
7) Kabupaten Kolaka Timur	7) SG-07
8) Kabupaten Kolaka Utara	8) SG-08
9) Kabupaten Konawe	9) SG-09
10) Kabupaten Konawe Kepulauan	10) SG-10
11) Kabupaten Konawe Selatan	11) SG-11
12) Kabupaten Konawe Utara	12) SG-12
13) Kabupaten Muna	13) SG-13
14) Kabupaten Muna Barat	14) SG-14
15) Kabupaten Wakatobi	15) SG-15
16) Kota Bau-Bau	16) SG-16
17) Kota Kendari	17) SG-17
bb. PROVINSI SULAWESI BARAT	bb. SR
1) Kabupaten Majene	1) SR-01
2) Kabupaten Mamasa	2) SR-02
3) Kabupaten Mamuju	3) SR-03
4) Kabupaten Mamuju Tengah	4) SR-04
5) Kabupaten Mamuju Utara	5) SR-05
6) Kabupaten Polewali Mandar	6) SR-06

DAERAH	KODE
cc. PROVINSI SULAWESI SELATAN 1) Kabupaten Bantaeng 2) Kabupaten Barru 3) Kabupaten Bone 4) Kabupaten Bulukumba 5) Kabupaten Enrekang 6) Kabupaten Gowa 7) Kabupaten Jenepono 8) Kabupaten Kepulauan Selayar 9) Kabupaten Luwu 10) Kabupaten Luwu Timur 11) Kabupaten Luwu Utara 12) Kabupaten Maros 13) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 14) Kabupaten Pinrang 15) Kabupaten Sidenreng Rappang 16) Kabupaten Sinjai 17) Kabupaten Soppeng 18) Kabupaten Takalar 19) Kabupaten Tana Toraja 20) Kabupaten Toraja Utara 21) Kabupaten Wajo 22) Kota Makassar 23) Kota Palopo 24) Kota Parepare	cc. SN 1) SN-01 2) SN-02 3) SN-03 4) SN-04 5) SN-05 6) SN-06 7) SN-07 8) SN-08 9) SN-09 10) SN-10 11) SN-11 12) SN-12 13) SN-13 14) SN-14 15) SN-15 16) SN-16 17) SN-17 18) SN-18 19) SN-19 20) SN-20 21) SN-21 22) SN-22 23) SN-23 24) SN-24
dd. PROVINSI GORONTALO 1) Kabupaten Boalemo 2) Kabupaten Bone Bolango 3) Kabupaten Gorontalo 4) Kabupaten Gorontalo Utara 5) Kabupaten Pohuwato 6) Kota Gorontalo	dd. GO 1) GO-01 2) GO-02 3) GO-03 4) GO-04 5) GO-05 6) GO-06
ee. PROVINSI MALUKU 1) Kabupaten Buru	ee. MA 1) MA-01

DAERAH	KODE
2) Kabupaten Buru Selatan 3) Kabupaten Kepulauan Aru 4) Kabupaten Maluku Barat Daya 5) Kabupaten Maluku Tengah 6) Kabupaten Maluku Tenggara 7) Kabupaten Maluku Tenggara Barat 8) Kabupaten Seram Bagian Timur 9) Kabupaten Seram Bagian Barat 10) Kota Ambon 11) Kota Tual	2) MA-02 3) MA-03 4) MA-04 5) MA-05 6) MA-06 7) MA-07 8) MA-08 9) MA-09 10) MA-10 11) MA-11
ff. PROVINSI MALUKU UTARA 1) Kabupaten Halmahera Barat 2) Kabupaten Halmahera Tengah 3) Kabupaten Halmahera Utara 4) Kabupaten Halmahera Selatan 5) Kabupaten Kepulauan Sula 6) Kabupaten Halmahera Timur 7) Kabupaten Pulau Morotai 8) Kabupaten Pulau Taliabu 9) Kota Ternate 10) Kota Tidore Kepulauan	ff. MU 1) MU-01 2) MU-02 3) MU-03 4) MU-04 5) MU-05 6) MU-06 7) MU-07 8) MU-08 9) MU-09 10) MU-10
gg. PROVINSI PAPUA 1) Kabupaten Asmat 2) Kabupaten Biak Numfor 3) Kabupaten Boven Digoel 4) Kabupaten Deiyai 5) Kabupaten Dogiyai 6) Kabupaten Jayawijaya 7) Kabupaten Jayapura 8) Kabupaten Intan Jaya 9) Kabupaten Keerom 10) Kabupaten Kepulauan Yapen 11) Kabupaten Lanny Jaya 12) Kabupaten Mamberamo Raya	gg. PA 1) PA-01 2) PA-02 3) PA-03 4) PA-04 5) PA-05 6) PA-06 7) PA-07 8) PA-08 9) PA-09 10) PA-10 11) PA-11 12) PA-12

DAERAH	KODE
13) Kabupaten Mamberamo Tengah	13) PA-13
14) Kabupaten Mappi	14) PA-14
15) Kabupaten Merauke	15) PA-15
16) Kabupaten Mimika	16) PA-16
17) Kabupaten Nabire	17) PA-17
18) Kabupaten Nduga	18) PA-18
19) Kabupaten Paniai	19) PA-19
20) Kabupaten Pegunungan Bintang	20) PA-20
21) Kabupaten Puncak	21) PA-21
22) Kabupaten Puncak Jaya	22) PA-22
23) Kabupaten Sarmi	23) PA-23
24) Kabupaten Supiori	24) PA-24
25) Kabupaten Tolikara	25) PA-25
26) Kabupaten Waropen	26) PA-26
27) Kabupaten Yahukimo	27) PA-27
28) Kabupaten Yalimo	28) PA-28
29) Kota Jayapura	29) PA-29
hh. PROVINSI PAPUA BARAT	hh. PB
1) Kabupaten Fakfak	1) PB-01
2) Kabupaten Kaimana	2) PB-02
3) Kabupaten Manokwari	3) PB-03
4) Kabupaten Manokwari Selatan	4) PB-04
5) Kabupaten Pegunungan Arfak	5) PB-05
6) Kabupaten Maybrat	6) PB-06
7) Kabupaten Raja Ampat	7) PB-07
8) Kabupaten Sorong	8) PB-08
9) Kabupaten Sorong Selatan	9) PB-09
10) Kabupaten Tambrauw	10) PB-10
11) Kabupaten Teluk Bintuni	11) PB-11
12) Kabupaten Teluk Wondama	12) PB-12
13) Kota Sorong	13) PB-13

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN